

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan pada lingkungan sektor publik mempunyai peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik, informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses untuk mengambil suatu keputusan. Pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksaan pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah sendiri. (Noridawan 2009) Dalam laporan keuangan yang disusun harus memenuhi dari prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010, hal tersebut dilakukan supaya informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat. Informasi yang bernilai merupakan informasi yang memiliki nilai, informasi tersebut akan berguna jika memenuhi kriteria yang dikehendaki yang ada dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang terdapat dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu : relevan, andal, dapat dipertimbangkan, dapat dipahami.

Keandalan merupakan bagian informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, sebuah laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang dapat menyesatkan serta kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi kebenarannya. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan karakteristik kualitatif yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan

administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Surastiani, Dyah, and Handayani 2015) Jika sesuai berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah kota Bandar Lampung berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan, pemerintah Kota Bandar Lampung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau (WTP) sepuluh kali terhitung sejak 2009-2019. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota tahun anggaran 2020 hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal itu disebabkan adanya permasalahan baik dalam penyajian materi maupun dalam pos laporan keuangan, dalam hal ini walikota Bandar Lampung akan mengevaluasi kepala BPKAD Kota Bandar Lampung ([alteripost.co](mailto:alteripost.co)).

BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Mei 2021 di ruang Auditorium BPK Provinsi Lampung. Dengan diserahkannya LHP atas LKPD Kota Bandar Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah selesai menyerahkan LHP kepada seluruh 16 Entitas Pemeriksaan di Provinsi Lampung, BPK RI memberikan pemkot kota Bandar Lampung dengan opini WDP (<https://lampung.bpk.go.id>).

Menurut Harlinda (2016) laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, keandalan laporan keuangan tidak lepas dari pengaruh sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Hal ini karena manusia adalah roda penggerak organisasi sehingga organisasi/Pemerintah dapat mewujudkan dan mencapai tujuannya, Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam

organisasi, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia agar menghasilkan sumber daya yang baik dan kompeten serta dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan dari organisasi, sumber daya manusia yang baik juga dapat membantu jalannya pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku dan pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta mampu memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para stakeholder.

(Jogianto and Hartono 1995) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambilan keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dicapai melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang baik, maka pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan agar mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kasus kelemahan pengendalian akuntansi dan kualitas pelaporan internal yaitu pencatatan tidak atau belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi laporan akuntansi dan pelaporan tidak memadai serta sistem informasi laporan akuntansi dan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.

Menurut (Puspaningsih 2017) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP), menjelaskan tentang pengertian SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, laporan keuangan yang disampaikan harus mengikuti SAP sesuai Peraturan pemerintah No.71 tahun 2010.

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK menemukan beberapa kelemahan pengendalian akuntansi dan kualitas pelaporan internal yaitu belum dilakukan secara akurat proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan sistem informasi laporan akuntansi dan pelaporan tidak memadai serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Pentingnya keandalan laporan keuangan memotivasi untuk meneliti apakah faktor-faktor yang meliputi yaitu Sumber daya manusia, Teknologi Informasi, Standar Akuntansi pemerintah, Pengendalian internal berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan hal ini penting agar fenomena yang terjadi terkait permasalahan di pelaporan keuangan yang membuat pelaporan keuangan mengalami salah saji dan gagal meraih WTP pada tahun 2020 tidak terjadi kembali.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu (Dheansi Putri 2020) pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang merupakan replika dari penelitian (Dheansi Putri 20). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada populasi dan variabel, analisis data yang dipakai, Berdasarkan paparan hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan masih perlu di maksimalkan lagi agar memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Sesuai dengan Standar Akuntansi Publik. maka peneliti tertarik meneliti tentang keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dengan Judul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Laporan Keuangan BPKAD Kota Bandar Lampung”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus sistematis sesuai dengan harapan penelitian. Penelitian ini mempunyai Variabel independenya yaitu Sumber daya Manusia, Teknologi Informasi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal, variabel dependennya yaitu Keandalan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah dalam penelitian penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian sebagai berikut ini.

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?

3. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?
4. Apakah pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut ini.

1. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

##### **1. Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah bagain akuntansi khususnya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik. Sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai informasi laporan keuangan.

## 2. Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kepada akademik mengenai pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, standar akuntansi pemerintah, dan pengendalian internal akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dan dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya.

## 3. Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penelitian mengenai keuangan di sektor pemerintah, serta mengetahui hubungannya sumber daya manusia, teknologi informasi, standar akuntansi pemerintah, dan pengendalian internal akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, penelitian dapat melatih untuk berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan masalah terkait, dan dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama berada di perkuliahan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi bertujuan agar memberikan gambaran garis besar mengenai isi skripsi dengan jelas dan terstruktur, maka dibawah ini digambarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, tentang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Pengendalian Internal Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini membahas secara ringkas tentang teori-teori pada penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis (Dugaan Sementara).

### **BAB III :Metode Penelitian**

Dalam bab ini membahas tentang metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian, hubungan antara variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data serta analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini membahas tentang meguraikan hasil dan pembahasan mengenai Sumber Daya Manusia,Teknologi Informasi,Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Keandalan Laporan Keuangan.

### **BAB V : Simpulan dan Saran**

Dalam bab ini membahas tentang kesimpula berdasarkan hasil pembahasan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian, memberikan saran dan perbaikan bagi pihak yang bersangkutan.